

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan usaha kecil diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Sekarang ini di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan pemerintah atau masyarakat ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Lembaga-lembaga tersebut dapat dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) baik yang berbasis syariah maupun konvensional dalam bentuk koperasi.

Lembaga Keuangan Mikro menurut Undang Undang No. 1 tahun 2013 adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman maupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, serta pengelolaan simpanan. Sektor keuangan mikro sangatlah berperan memobilisasikan dana masyarakat untuk berbagai tujuan mengalami peningkatan yang sangat besar. Saat ini sektor keuangan mikro tersebut menjadi sektor yang sangat berpengaruh bagi perekonomian. Diantara lembaga keuangan mikro yang sangat berpengaruh adalah Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro syariah, kedudukannya sejajar dengan koperasi dan bentuk badan usahanya berbadan hukum koperasi (Murdiana, 2016:274). Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT berdasar pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 tahun 2012 dan pelaksanaannya yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan koperasi konvensional telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 dengan badan hukum Koperasi Simpan Pinjam (KSP), bahwa KSP merupakan koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.

BMT dan KSP ini memiliki peranan yang penting dalam pertumbuhan perekonomian, khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah. BMT memiliki dua fungsi utama, sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti ZISWAF, serta dapat pula berfungsi sebagai lembaga keuangan. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian (Soemitra, 2010:452). Selain itu, bahwa koperasi juga mempunyai fungsi dan peran menurut pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 yaitu membangun

dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat pada umumnya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat, serta berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Perkembangan koperasi ini sangat pesat. Bersumber data dari Kemenkop UKM, tercatat jumlah total koperasi di Indonesia saat ini sebanyak 212.135. Jumlah total koperasi tersebut terbagi atas 150.223 unit koperasi aktif dan 61.912 unit koperasi tidak aktif. Dari jumlah tersebut 1,5 persen merupakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS). Tercatat jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit dengan anggota 1,4 juta orang. (<http://www.depkop.go.id/>). Khususnya di daerah Yogyakarta, BMT di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus berkembang. Bahkan BMT di DIY disebut sebagai barometer BMT di Indonesia, karena paling banyak jumlah dan produktivitasnya (<http://m.republika.co.id/>). Hal ini juga akan berpengaruh pada kesejahteraan ekonomi masyarakat kecil menengah ke bawah khususnya.

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di DIY dengan perekonomian yang melambat. Pemerintah kabupaten Kulon Progo dinilai gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi sekitar 5,4 persen pada tahun 2016 (<http://m.antarayogya.com/>). Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah pemerintah mencanangkan pada sektor jasa keuangan. Di

daerah Kulon Progo sendiri terdapat beberapa lembaga keuangan mikro yang masih berkembang, khususnya BMT dan KSP dengan badan hukum koperasi. Adapun data perkembangan koperasi di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Data Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2016**

Uraian	Satuan	2014	2015	2016
<b>Jumlah Koperasi</b>	Unit	365	377	392
<b>Jumlah Anggota</b>	Orang	82.343	85.870	87.367
<b>Jumlah Asset</b>	Rp.000	222.927.291	256.514.690	282.165.000

*Sumber: LKjIP DINKOP UMKM Kulon Progo*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa perkembangan koperasi di Kabupaten Kulon Progo setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah koperasi sebanyak 365 unit dengan jumlah anggota 82.343 orang dan jumlah asset Rp 222.927.291.000, tahun 2015 jumlah koperasi sebanyak 377 unit dengan jumlah anggota 85.870 orang dan jumlah asset Rp 256.514.690.000, dan pada tahun 2016 jumlah koperasi sebanyak 392 unit dengan jumlah anggota 87.367 orang dan jumlah asset Rp 282.165.000.000.

Dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan mikro tersebut, maka akan berdampak pula bagi ekonomi masyarakat. Berbagai lembaga keuangan mikro baik BMT maupun koperasi didirikan demi mengatasi kebutuhan dan keinginan masyarakat kecil menengah ke bawah untuk mengembangkan usahanya terutama pedagang pasar. Pedagang kecil dan pedagang yang ada di pasar adalah diantara masyarakat yang sangat membutuhkan BMT maupun koperasi sebagai sarana mengembangkan

segala unsur acuan pemasaran dalam mempengaruhi konsumen (Assauri, 2010:265).

Pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan para pelanggan atau nasabah. Pelayanan juga sebagai pengantar bagi aliran nilai tambah yang akan disampaikan kepada nasabah, hingga nilai tambah tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan nasabah (Ranto, 2013:11). Pelayanan yang dilakukan LKM tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat di pasar. Selain itu, faktor kepercayaan juga dapat mempengaruhi minat konsumen untuk menggunakan jasa lembaga keuangan tersebut. Kepercayaan pedagang pasar yang masih rendah terhadap lembaga keuangan mikro.

Dari berbagai permasalahan faktor tersebut dapat mempengaruhi pilihan masyarakat dalam memilih antara LKM Syariah atau sering dikenal dengan istilah BMT dengan sistem bagi hasil maupun LKM Konvensional yaitu koperasi dengan sistem bunga. Oleh karena itu, masyarakat akan dihadapkan pada persaingan antara mengakses di BMT maupun koperasi simpan pinjam (KSP). Dari penjelasan di atas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Mengakses di Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional (Studi Kasus pada Pedagang di Pasar Wates, Kulon Progo)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor lokasi berpengaruh dalam menentukan minat masyarakat untuk mengakses di BMT maupun KSP?
2. Apakah faktor promosi berpengaruh dalam menentukan minat masyarakat untuk mengakses di BMT maupun KSP?
3. Apakah faktor pelayanan berpengaruh dalam menentukan minat masyarakat untuk mengakses di BMT maupun KSP?
4. Apakah faktor kepercayaan berpengaruh dalam menentukan minat masyarakat untuk mengakses di BMT maupun KSP?
5. Apakah faktor lokasi, promosi, pelayanan dan kepercayaan secara simultan berpengaruh dalam menentukan minat masyarakat untuk mengakses di BMT maupun KSP?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis apakah faktor lokasi berpengaruh dalam menentukan minat masyarakat untuk mengakses di BMT maupun KSP.
2. Untuk menganalisis apakah faktor promosi berpengaruh dalam menentukan minat masyarakat untuk mengakses di BMT maupun KSP.
3. Untuk menganalisis apakah faktor pelayanan berpengaruh dalam menentukan minat masyarakat untuk mengakses di BMT maupun KSP.

4. Untuk menganalisis apakah faktor kepercayaan berpengaruh dalam menentukan minat masyarakat untuk mengakses di BMT maupun KSP.
5. Untuk menganalisis apakah faktor lokasi, promosi, pelayanan dan kepercayaan secara simultan berpengaruh dalam menentukan minat masyarakat untuk mengakses di BMT maupun KSP.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yaitu Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional (LKMK) yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tentang karakteristik nasabah dalam menentukan pilihannya, sehingga suatu lembaga keuangan dapat mengoptimalkan dan mengembangkan proses pelayanannya kepada masyarakat khususnya untuk masyarakat kecil menengah yang ada pada pasar, sehingga dapat dijadikan acuan dalam upaya mendukung strategi perkembangannya di masa yang akan datang.

##### **2. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dijadikan sebagai sumber pengetahuan, rujukan maupun referensi untuk pengembangan penelitian lain yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu BMT dan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional

## **E. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab, masing-masing terbagi lagi menjadi sub-sub bab yang bersifat saling mendukung dan menjelaskan bab-bab itu sendiri. Adapun rumusan sistematikanya adalah sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

Pada bagian ini diuraikan tentang tinjauan pustaka, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka berfikir dan hipotesis.

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini dijelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

### **BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan gambaran umum lokasi penelitian dalam hal ini adalah profil kabupaten Kulon Progo dan profil pasar Wates, gambaran umum responden, serta pembahasan yang berisi tentang hasil analisis dari pengolahan data dan selanjutnya dilakukan

pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan hasil dari penelitian.

## **BAB V. PENUTUP**

Dalam bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran, serta akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian.